



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : PLN KANTOR PUSAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HENING KYAT PAMUNGKAS
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT PROJECT MANAGEMENT OFFICE
3. NHK : 197127

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 7.470.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/112 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah Seluas 960 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
5. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
6. Tanah Seluas 4545 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.740.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 935.000.000**

1. MOBIL, HONDA NEW CITY 2015 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 63.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.254.895.863
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	10.722.895.863
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.722.895.863

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.